



---

## Environmental Governance Dalam Program Kampung Edukasi Sampah (KES) Kabupaten Sidoarjo

Achmad Idris Ramadhon<sup>1</sup>, Agustin Dwi Setyowati<sup>2</sup>, Dwi Nanda Cahya Yuliani<sup>3</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [23041010189@student.upnjatim.ac.id](mailto:23041010189@student.upnjatim.ac.id)

[23041010170@student.upnjatim.ac.id](mailto:23041010170@student.upnjatim.ac.id), [23041010195@student.upnjatim.ac.id](mailto:23041010195@student.upnjatim.ac.id)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 23 Juni 2026

---

### ABSTRACT

*The waste problem in Indonesia continues to grow with East Java Province recorded as the largest waste producer nationally and Sidoarjo Regency as one of its major contributors. This study aims to examine the implementation of Environmental Governance in the Waste Education Village (KES) Program in Sekardangan Village, Sidoarjo Regency. A qualitative method with a case study approach was employed, using interviews with staff from the Environmental and Sanitation Agency and Waste Education Village (KES) managers, supplemented by secondary data from official documents. The results show that the Waste Education Village (KES) program has performed well across all four governance objectives. In terms of Effectiveness, the program runs with clear direction through coordination among residents, Waste Education Village (KES) administrators, and local government. In terms of Equity, community members have equal opportunities to participate in waste management and environmental education. In terms of Responsiveness, Waste Education Village (KES) has adapted through innovations such as the Organic Source Hole and environmental cadre regeneration. In terms of Robustness, the program demonstrates institutional resilience through cross-sector collaboration, despite ongoing challenges in funding. This study concludes that active collaboration between communities and government is the key to environmental governance.*

**Keywords:** Environmental Governance, Waste Education Village, Waste Management.

### ABSTRAK

*Permasalahan sampah di Indonesia terus meningkat dan Provinsi Jawa Timur tercatat sebagai penghasil timbunan sampah terbesar secara nasional dengan Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu penyumbang utamanya. Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan Environmental Governance dalam Program Kampung Edukasi Sampah (KES) di Kelurahan Sekardangan Kabupaten Sidoarjo. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara dengan pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo serta pengelola Kampung Edukasi Sampah (KES), dilengkapi data sekunder dari dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kampung Edukasi Sampah (KES) telah berjalan cukup baik pada keempat tujuan tata kelola lingkungan. Dari sisi Effective, program berjalan terarah melalui koordinasi antara masyarakat, pengurus Kampung Edukasi Sampah (KES), dan pemerintah daerah. Dari sisi Equitable, masyarakat memperoleh ruang partisipasi yang setara dalam pengelolaan sampah dan edukasi lingkungan. Dari sisi Responsive, Kampung Edukasi Sampah (KES) mampu*

*beradaptasi melalui inovasi seperti Lubang Sumber Organik dan regenerasi kader lingkungan. Dari sisi Robust, program menunjukkan ketahanan kelembagaan melalui jaringan kerja sama lintas sektor meski masih menghadapi keterbatasan pendanaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi aktif antara masyarakat dan pemerintah menjadi kunci keberhasilan tata kelola lingkungan.*

**Kata kunci:** *Environmental Governance, Kampung Edukasi Sampah, Pengelolaan Sampah.*

## PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan salah satu upaya negara dalam mewujudkan keseimbangan antara kehidupan berbangsa, bernegara, dan kehidupan bermasyarakat. Dalam pelaksanaannya, pembangunan tidak hanya berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, tetapi masyarakat juga berperan sebagai aktor yang terlibat aktif, salah satunya pada aspek kelestarian lingkungan hidup guna pembangunan di masa mendatang. Namun, berbagai permasalahan lingkungan pada kenyataannya masih menjadi tantangan yang dihadapi Indonesia. Dalam hal ini, keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan menjadi bentuk dukungan untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang ada di sekitar masyarakat. Masalah sampah merupakan isu lingkungan krusial di Indonesia yang terus memburuk akibat ketidakseimbangan antara peningkatan timbunan sampah dengan kapasitas pengelolannya. Sampah dihasilkan dari sisa kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah mendefinisikan "*sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat*".

Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Lingkungan Hidup atau Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menyebutkan Provinsi Jawa Timur menduduki posisi pertama nasional penghasil timbunan sampah terbanyak dengan jumlah timbulan sampah harian sebesar 11.924,49 (ton/hari) dan timbulan sampah tahunan sebesar 4.352.437,24 (ton/tahun) pada tahun 2025 (Kementerian Lingkungan Hidup). Dengan ini, pemerintah provinsi Jawa Timur masih bersikeras dalam menangani permasalahan sampah yang kian meningkat hingga hari ini. Tingginya volume timbunan sampah di Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari kontribusi Kabupaten Sidoarjo yang menjadi salah satu daerah penghasil sampah terbesar. Pada tahun 2025 volume timbulan sampah di Kabupaten Sidoarjo tercatat sebagai yang terbesar keempat di Jawa Timur dengan berada di bawah Kota Surabaya, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Jember.

Mencatat pada data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) bahwa timbulan sampah Kabupaten Sidoarjo di tahun 2024 sebanyak 313.401,68 ton dan melonjak sebesar 325.676,56 ton di tahun 2025. Melonjaknya timbulan sampah ini dapat disebabkan oleh faktor seperti tingkat pendapatan, lokasi tempat tinggal (pusat kota atau pinggiran), musim, dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah mempengaruhi timbulan sampah rumah tangga (Fasya, Ibad, El Muna, & Arum, 2025).

Kabupaten Sidoarjo merupakan wilayah yang berbatasan secara langsung dengan Kota Surabaya. Kabupaten Sidoarjo dalam jumlah penduduk juga mengalami

---

kenaikan, hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil registrasi penduduk dimana selama tiga tahun ini mengalami peningkatan (Ramadhon, 2026). Berdasarkan permasalahan sampah yang kian meningkat serta meninjau dari dokumen Konsentrasi Isu Strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029 di mana menyebutkan terkait rendahnya upaya pengelolaan sampah yang menjadi isu strategis di Kabupaten Sidoarjo. Maka dalam menangani permasalahan ini Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah memiliki sejumlah upaya yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan mulai dari pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah melalui fasilitas TPS/TPST atau Tempat Penampungan Sementara/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu hingga program-program lingkungan yang dibentuk oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo menginisiasi Program Sidoarjo Bersih dan Hijau (SBH) sebagai salah satu upaya pelestarian lingkungan yang masih berlangsung hingga saat ini. Program yang telah berjalan sejak tahun 2010 tersebut dilaksanakan secara rutin sebagai media pembelajaran lingkungan bagi masyarakat. Selain bertujuan menumbuhkan kesadaran lingkungan, program ini juga diarahkan untuk membentuk perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup (Kampung Edukasi Sampah).

Pada periode 2017–2018, RT 23/RW 07 Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, berhasil meraih penghargaan sebagai pemenang Program Sidoarjo Bersih dan Hijau (SBH) pada kategori Kampung Terinovatif. Keberhasilan tersebut diperoleh berkat komitmen masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan serta mengelola sampah. Atas pencapaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan apresiasi dengan menjadikan wilayah tersebut sebagai kampung percontohan bagi daerah lain dalam upaya pelestarian lingkungan dan pengelolaan sampah. Selanjutnya, RT 23/RW 07 Kelurahan Sekardangan dikenal sebagai Kampung Edukasi Sampah (KES). Konsep yang diterapkan dalam kampung ini berfokus pada kegiatan edukasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan, dampak negatif sampah, serta praktik pengelolaan sampah yang baik dan benar. Edukasi tersebut ditujukan kepada berbagai kelompok masyarakat mulai dari anak-anak usia sekolah, masyarakat dewasa, hingga warga kampung sekitar. Melalui kegiatan tersebut diharapkan tumbuh kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, serta mendorong dan membantu wilayah lain dalam mengembangkan pengelolaan lingkungan (Ningsih & Farid, 2023).

Prestasi Kampung Eduksi Sampah (KES) RT 23/RW 07 Kelurahan Sekardangan tidak berhenti pada penghargaan sebelumnya. Pada tahun 2022, kampung tersebut kembali memperoleh penghargaan Desa Berseri Tingkat Mandiri yang diberikan dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2022. Penghargaan ini menjadi bukti atas keberhasilan serta konsistensi masyarakat dalam menerapkan pengelolaan lingkungan dan pengelolaan sampah (Agusti &

Wibawani, 2023). Dalam perkembangannya, Kampung Edukasi Sampah (KES) terus memperkuat kemandirian dan keberlanjutan organisasi melalui transformasi kelembagaan menjadi Yayasan Edukasi Kelola Sampah. Pengesahan yayasan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0021100.AH.01.04 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Pendirian Yayasan Edukasi Kelola Sampah yang disahkan pada tanggal 19 Desember 2023. Transformasi kelembagaan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat legalitas organisasi, memperluas jejaring kerja sama, serta mendukung keberlanjutan program pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat di Kampung Edukasi Sampah (KES) Kelurahan Sekardangan Kabupaten Sidoarjo.

Terbaru pada tahun 2025, KES RT 23/RW 07 Kelurahan Sekardangan juga berhasil masuk sebagai salah satu lokasi verifikasi lapangan dalam ajang penghargaan STBM Award 2025 yang diselenggarakan oleh Kemenkes (Kampung Edukasi Sampah). Dalam hal ini berarti Kampung Edukasi Sampah (KES) RT 23/RW 07 Kelurahan Sekardangan menunjukkan konsistensi dalam pengelolaan lingkungan dan pengolahan sampah serta diakui secara berkelanjutan melalui berbagai penghargaan.

Keberhasilan Kampung Edukasi Sampah (KES) RT 23/RW 07 Kelurahan Sekardangan dalam mengelola lingkungan dan menekan produksi sampah rumah tangga menunjukkan peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi timbulan sampah. Kampung Edukasi Sampah (KES) menjadi contoh pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat yang mendorong keterlibatan warga setempat khususnya di RT 23 RW 07. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah juga turut berperan melalui Program Sidoarjo Bersih dan Hijau (SBH) dengan memberikan pendampingan oleh tenaga ahli terkait. Dalam hal ini Kampung Edukasi Sampah (KES) mencerminkan konsep Environmental Governance yaitu kesadaran akan pentingnya pengelolaan yang mampu menanggapi produksi limbah yang dihasilkan serta kegiatan tersebut termasuk dalam program yang diselenggarakan pemerintah dengan mengutamakan aspek keberlanjutan dan pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber daya alam dengan melalui keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat (Desrinelti, Afifah, & Gistituati, 2021; Wijayanti & Suryani, 2015).

Penelitian mengenai Kampung Edukasi Sampah (KES) Kabupaten Sidoarjo sebenarnya telah dilakukan dari beberapa sudut pandang. Ningsih & Farid (2023) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan Kampung Edukasi Sampah (KES) menggunakan bentuk-bentuk partisipasi berjalan baik mulai dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi masyarakat dalam evaluasi, serta partisipasi dalam pemanfaatan lingkungan yang bersih dan hijau dilihat dari pengelolaan sampah menjadi peluang usaha. Sejalan dengan hal tersebut, Safitri & Choiriyah (2023) dalam penelitiannya memotret hal ini melalui sudut pandang pemberdayaan ekonomi dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan bank sampah telah berjalan cukup baik jika ditinjau dari aspek pembangunan manusia, ekonomi, dan lingkungan hidup. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan pada aspek

pengembangan kelembagaan yang perlu ditingkatkan. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Bank Sampah di Kampung Edukasi Sampah (KES) Kabupaten Sidoarjo meliputi rendahnya pemahaman masyarakat mengenai klasifikasi sampah, terbatasnya kapasitas masyarakat dalam mengelola sampah, serta kurangnya keterampilan yang mendukung kegiatan pengelolaan sampah secara optimal. Studi lainnya oleh Agusti & Wibawani (2023) memperkuat argumen ini dengan temuan bahwa akses dan peluang untuk terlibat dalam kegiatan lingkungan merupakan elemen kunci dalam mendorong partisipasi masyarakat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin besar kesempatan yang diberikan kepada masyarakat Kampung Edukasi Sampah (KES) semakin tinggi pula tingkat kemauan dan kapasitas mereka untuk berkontribusi dalam upaya pengelolaan serta pelestarian lingkungan hidup.

Dari ketiga penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa masih ditemukan sebuah permasalahan yang mana permasalahan ini menjadi *gap research* utama dalam penelitian ini. Jika dilihat dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Safitri & Choiriyah (2023) menunjukkan adanya kekurangan pada aspek kelembagaan, terbatasnya pengetahuan masyarakat terkait pemilahan sampah, rendahnya kemampuan dalam menjalankan pengelolaan sampah, serta kurang memadainya keterampilan masyarakat dalam mengolah dan menangani sampah secara tepat. Selain itu, urgensi penelitian ini juga didukung dari *gap research* yang telah ada terkait peran pemerintah yang minim. Sehingga hal ini menjadi peringatan bahwa sebuah program memerlukan manajemen organisasi yang profesional untuk membina dan membimbing. Ketiga penelitian terdahulu tersebut juga memberikan kesimpulan bahwa pengelolaan lingkungan dan sampah memerlukan partisipasi aktif, pemberdayaan, serta kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah agar program dapat terus berjalan.

Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah dipengaruhi oleh keterlibatan aktif dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, implementasi program, hingga evaluasi, serta didukung oleh adanya edukasi dan penguatan kapasitas masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini relevan untuk mengkaji bagaimana kerangka Environmental Governance diterapkan dalam pengelolaan sampah Kampung Edukasi Sampah (KES) guna menciptakan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Bennett & Satterfield (2018) mendefinisikan bahwa "*Governance is generally defined as the institutions, structures, and processes that determine who makes decisions, how and for whom decisions are made, whether, how and what actions are taken and by whom and to what effect* (Pemerintahan merujuk pada institusi, struktur, dan proses yang menentukan siapa yang membuat keputusan, bagaimana keputusan dibuat, serta tindakan apa yang diambil dan dampaknya dalam suatu sistem, termasuk dalam konteks pengelolaan lingkungan)". Teori ini menekankan pada prinsip-prinsip tata kelola yaitu: (1) tata kelola yang efektif; (2) tata kelola yang adil; (3) tata kelola responsif; dan (4) tata kelola yang kuat.

Dari teori *Environmental Governance* milik Bennett & Satterfield (2018) tersebut menawarkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan temuan penelitian terdahulu yang menyatakan permasalahan terletak pada rendahnya pemahaman dan keterampilan

teknis warga terkait klasifikasi dan pengelolaan sampah serta kelembagaan yang belum kuat. Selain itu pada teori milik Bennett & Satterfield (2018) terdapat tujuan yang sesuai dengan permasalahan kelembagaan yaitu pada tujuan *Robust*. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Environmental Governance Dalam Program Kampung Edukasi Sampah (KES) Kabupaten Sidoarjo”.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Creswell J. W. & D. (2023) Studi kasus adalah desain kualitatif di mana peneliti menyelidiki secara mendalam sebuah program, acara, kegiatan, proses, atau satu atau lebih individu. Fokus penelitian ini ada pada implementasi Kampung Edukasi Sampah (KES) Kelurahan Sekardangan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan teori Bennett & Satterfield (2018) dimana terdiri dari empat tujuan yaitu (1) *Effective* (Efektivitas); (2) *Equitable* (Keadilan); (3) *Responsive* (Responsif); dan (4) *Robust* (Ketahanan). Sumber data pada penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Pada data primer, data diperoleh langsung dari informan melalui teknik pengumpulan data wawancara dan observasi. Untuk wawancara penulis memilih Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Sidoarjo dan Pengelola Kampung Edukasi Sampah (KES) sebagai informan penelitian. Teknik pemilihan informan ini menggunakan *purposive sampling* karena berdasarkan keberadaan mereka dalam populasi atau kriteria lainnya (Stratton, 2024). Pada data sekunder, data diperoleh dengan mengakses dokumen-dokumen resmi yang memiliki relevansi dengan penelitian seperti undang-undang, artikel ilmiah, maupun laporan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan model analisis data Miles, Huberman, & Saldana (2018) yang terbagi menjadi tiga alur aktivitas yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan. Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan model triangulasi sumber, model, dan data sebagai pendukung keabsahan data serta mencapai titik jenuh penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil dan pembahasan mengenai Environmental Governance menurut teori Bennett & Satterfield (2018) yang terdiri dari 4 tujuan sebagai berikut :

### *Effective (Efektivitas)*

Dalam teori Bennett & Satterfield (2018) pada teori *Environmental Governance* memiliki tujuan yang pertama adalah *Effective*. Dimana *Effective* adalah “*Supports maintenance of system integrity and functioning.*” Menurut Bennett & Satterfield (2018), *effective* ditandai dengan adanya sub tujuan yang meliputi *direction, coordination, capacity, informed, accountable, efficient*. Pada tujuan *effective* KES dapat dikatakan sudah berjalan cukup baik karena program ini mampu mempertahankan fungsi sistem pengelolaan sampah sekaligus menjaga kualitas lingkungan masyarakat. *Effective* dalam hal ini tidak hanya diukur dari berhasil atau tidaknya program secara teknis, tetapi juga dari kemampuannya menjaga keberlanjutan sistem lingkungan

---

dan partisipasi masyarakat di dalamnya. “Ada beberapa orang yang kita sebut dengan kader lingkungan sebagai *agent of change* untuk bergerak dulu memberikan contoh nah setelah itu baru kita bisa mengajak tetangga untuk ikut bergerak” (Wawancara dengan Pengelola KES, 2026). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningsih & Farid (2023) berpendapat bahwa kader lingkungan yang bertindak sebagai pengelola KES memiliki peran penting dalam mengajak dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. KES menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan dapat berjalan efektif ketika ada arah yang jelas, koordinasi yang baik, kapasitas yang memadai, informasi yang tersampaikan, akuntabilitas yang dijaga, dan sumber daya yang dimanfaatkan secara efisien.

Pada *direction*, program ini dirancang dengan tujuan yang jelas yakni membangun lingkungan yang bersih, hijau, dan nyaman. Adanya arah pengelolaan yang terdefinisi dengan baik menjadi landasan bagi para pihak yang terlibat dalam menjalankan program secara terkoordinasi. Dalam wawancara terlihat bahwa arah tersebut tidak hanya sebatas slogan tetapi diwujudkan melalui kegiatan nyata seperti pemilahan sampah, pengolahan kompos, dan edukasi kepada warga. Ini menunjukkan bahwa program memiliki orientasi yang sejalan dengan tujuan lingkungan.

Pada *coordination*, pengelolaan dilakukan melalui kerja sama antara pengurus, kader, warga, serta pihak eksternal seperti universitas dan CSR. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mustaghfiroh, Ni'mah, Sundusiyah, Addahlawi, & Hidayatullah (2020) pencapaian suatu tujuan tidak terlepas dari peran organisasi atau kelembagaan yang terlibat di dalamnya. Kelembagaan tersebut dapat mencakup instansi pemerintah, sektor swasta, serta kelompok masyarakat yang berfungsi sebagai aktor pendukung dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Meskipun koordinasi dengan pemerintah belum terlalu intensif, adanya komunikasi dengan berbagai pihak menunjukkan bahwa program tidak berjalan sendiri. “Untuk kerjasama dengan pihak swasta juga ada, kalau dengan sektor swasta itu biasanya berhubungan dengan pendanaan ya, CSR. Kalau dari pemerintah enggak ya. Kemudian kalau dari mahasiswa atau universitas itu ada beberapa mereka yang kerjasama dengan kita, Universitas 17 Agustus Surabaya kemarin itu pada saat pengabdian masyarakat, mereka memberikan penjernihan air dan pencacah plastik” (Wawancara dengan Pengelola KES, 2026). Koordinasi yang baik sangat penting dalam tata kelola lingkungan karena persoalan sampah tidak bisa diselesaikan oleh satu aktor saja. Dengan demikian, keberhasilan program sangat bergantung pada kemampuan pengelola dalam membangun hubungan kerja yang saling mendukung.

Pada *capacity*, pengelola memiliki kemampuan yang cukup dalam mengelola sampah dan mengedukasi masyarakat. Kapasitas ini diperoleh melalui pelatihan, pengalaman, serta pembelajaran dari berbagai sumber. Hal ini penting karena keberlanjutan program lingkungan sangat ditentukan oleh pengetahuan dan keterampilan para pengelola. “Kalau pengelolaan sampah kita itu insya Allah sudah siap ya, karena kita juga sudah melakukan mulai pemilahan, pengolahannya itu sudah kita lakukan. Jadi kalau untuk pengelolaan sampah kita sudah siap. Dalam KES kan juga ada edukasi untuk anak-anak sekolah juga. Otomatis ada pengajar-pengajar di dalamnya”

(Wawancara dengan Pengelola KES, 2026). Tanpa kapasitas yang memadai, program mudah berhenti atau tidak berkembang. Karena itu, temuan bahwa kader rutin mendapatkan pelatihan menunjukkan bahwa KES ini memiliki modal sosial dan teknis yang cukup kuat.

Pada *informed*, penyampaian informasi dilakukan secara bertahap melalui forum warga, grup komunikasi, media sosial, dan website. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mustaghfiroh, Ni'mah, Sundusiyah, Addahlawi, & Hidayatullah (2020) ketersediaan akses informasi merupakan faktor penting yang mendukung arus komunikasi antara penyedia dan penerima informasi, sehingga masyarakat dapat memperoleh serta menyampaikan informasi secara lebih efektif kepada khalayak umum. Pada KES menunjukkan bahwa pengelola berusaha agar masyarakat mengetahui dan memahami program yang dijalankan. Namun, masih adanya warga yang belum sepenuhnya paham menandakan bahwa proses informasi belum sepenuhnya merata. *"Meskipun kita kan termasuk role model ya, jadi harusnya warga itu paham tentang pemilahan sampah. Meskipun kenyataannya ada beberapa yang masih belum paham. Kalau dulu itu kita edukasi melalui grup-grup, kita kan ada grup PKK, ada grup Senam, grup apa di dalam RT itu. Nah pada saat kita kumpul-kumpul, biasanya kita selalu edukasikan, seperti itu. Awalnya yang mudah-mudahan aja memilah, kemudian setelah memilah, setelah paham, kemudian kita aja untuk mengolah, seperti itu"* (Wawancara dengan Pengelola KES, 2026). Berdasarkan data yang kita temukan dalam tata kelola lingkungan masyarakat yang terinformasi dengan baik akan lebih mudah diajak berpartisipasi sehingga aspek ini perlu terus diperkuat agar kesadaran kolektif semakin terbentuk.

Pada *accountable*, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mustaghfiroh, Ni'mah, Sundusiyah, Addahlawi, & Hidayatullah (2020) menjelaskan bahwa Akuntabilitas merupakan wujud pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh suatu instansi atau lembaga atas pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Dalam hal ini pengelola menunjukkan adanya tanggung jawab terhadap kegiatan dan lingkungan terutama melalui dokumentasi kegiatan dan perawatan fasilitas. Akuntabilitas ini penting karena masyarakat perlu mengetahui bahwa program dijalankan dengan benar dan memiliki hasil yang nyata. *"Kalau untuk pertanggung jawab ke lingkungan, seperti kita melakukan perbaikan-perbaikan tanaman, itu. Tapi kalau untuk keuangan, itu kita berdiri sendiri-sendiri, tidak tercampur jadi satu. tetapi kita support lingkungan RT. Dan laporan kegiatan kita itu selalu ada di Instagram dan juga website"* (Wawancara dengan Pengelola KES, 2026). Meski demikian, keterbukaan informasi keuangan masih terbatas karena laporan keuangan hanya disampaikan secara internal. Dalam perspektif tata kelola yang baik akuntabilitas akan lebih kuat jika tidak hanya mencakup tanggung jawab kegiatan tetapi juga transparansi pengelolaan sumber daya.

Pada *efficient*, pengelola mampu memanfaatkan sampah dan sarana yang tersedia untuk mendukung keberlanjutan program. *"Kita itu juga menjual misalkan ada tong komposter, itu juga merupakan salah satu pendanaan. Kemudian dari tamu-tamu kunjungan anak-anak sekolah yang berkunjung ke tempat kami, itu kami kenakan biaya masuk"* (Wawancara dengan Pengelola KES, 2026). Selain itu sampah organik diolah menjadi kompos sehingga mengurangi biaya pemeliharaan tanaman sedangkan

sampah anorganik dijual untuk mendukung kegiatan kampung. Efisiensi seperti ini menunjukkan bahwa program tidak hanya bergantung pada bantuan eksternal tetapi juga mampu menghasilkan manfaat dari sumber daya yang ada. Dengan demikian, efisiensi dalam konteks ini bukan semata-mata keuntungan finansial melainkan kemampuan menggunakan sumber daya secara tepat guna untuk mendukung fungsi sistem lingkungan.

### *Equitable (Keadilan)*

Berdasarkan teori Environmental Governance milik Bennett & Satterfield (2018), tujuan Equitable menekankan bahwa tata kelola lingkungan harus dilaksanakan secara inklusif melalui pengakuan terhadap kebutuhan masyarakat, pemberian ruang partisipasi yang setara, serta distribusi manfaat yang adil dalam pengelolaan lingkungan. Prinsip Equitable digunakan untuk melihat bagaimana KES melibatkan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan pengelolaan sampah melalui aspek *recognition, participation, fairness, dan justice*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan KES berangkat dari kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungan sekitar. Pengelola KES menjelaskan bahwa program tersebut dibentuk dengan tujuan menciptakan lingkungan yang bersih, indah, dan layak huni bagi masyarakat. Temuan ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap kebutuhan masyarakat sebagai dasar pembentukan program lingkungan KES. Dalam perspektif Bennett & Satterfield (2018), pengakuan terhadap kebutuhan masyarakat merupakan bagian penting dalam mewujudkan keadilan lingkungan (*environmental justice*) karena masyarakat ditempatkan sebagai subjek utama dalam tata kelola lingkungan.

Pelaksanaan KES juga menunjukkan adanya pendekatan partisipatif yang dilakukan secara bertahap. Pengelola tidak langsung melibatkan seluruh masyarakat tetapi memulai gerakan melalui kader lingkungan sebagai contoh bagi warga lainnya. Strategi tersebut dilakukan agar masyarakat dapat menerima program secara lebih terbuka. Misalnya, ketika sedang ada perkumpulan warga, pengelola KES melakukan pendekatan untuk mengenalkan sekaligus mengedukasi terkait lingkungan. Selain itu, penyampaian program dilakukan secara perlahan sesuai kondisi sosial masyarakat. Pendekatan ini diperkuat melalui kegiatan sosialisasi yang juga dilakukan oleh DLHK Kabupaten Sidoarjo ke berbagai desa dan kelurahan sebagai bentuk edukasi pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelola KES memahami keberagaman karakteristik masyarakat di lingkungan RT 23 RW 07 Kelurahan Sekardangan. Masyarakat memiliki latar belakang sosial, pendidikan, dan kebiasaan yang berbeda sehingga pengelola menerapkan pendekatan sosial yang fleksibel melalui kegiatan bersama masyarakat, komunikasi informal, dan edukasi lingkungan secara persuasif. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa tata kelola lingkungan dalam KES mempertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep Equity dalam teori Bennett & Satterfield (2018) yang menekankan pentingnya pengakuan terhadap keberagaman sosial dalam pelaksanaan tata kelola lingkungan.

Penerapan prinsip Equitable juga terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi program. Pengelola KES secara rutin melaksanakan evaluasi bulanan yang melibatkan kader lingkungan, pengurus RT, dan perwakilan masyarakat sebagaimana hasil wawancara dengan pengelola KES berikut, *"Tiap bulan itu biasanya kumpul-kumpul, kemudian memberikan inspirasi atau usulan-usulan, nanti dikodok di situ, nanti hasil akhirnya harus melakukan apa"* (Wawancara dengan Pengelola KES, 2026). Dalam forum tersebut masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan, kritik, dan masukan terhadap pelaksanaan program. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Ningsih & Ma'rif (2023) yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam KES telah berjalan melalui keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan hingga evaluasi program lingkungan. Kesamaan temuan tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi unsur penting dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan lingkungan berbasis komunitas di KES Kabupaten Sidoarjo.

Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penerima program tetapi juga sebagai aktor yang memiliki ruang dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi program mencerminkan prinsip tata kelola partisipatif sebagaimana dijelaskan Bennett & Satterfield (2018) bahwa keadilan lingkungan dapat tercapai apabila masyarakat memperoleh akses yang setara dalam proses pengelolaan lingkungan. Selain keterlibatan dalam evaluasi, bentuk partisipasi masyarakat juga diwujudkan melalui pembagian peran dalam pengelolaan lingkungan. KES memiliki beberapa kelompok kerja seperti pengelolaan bank sampah, pengomposan, dan pengelolaan air bersih yang dijalankan oleh masyarakat sesuai kemampuan dan minat masing-masing. Pembagian peran tersebut menunjukkan bahwa tata kelola lingkungan KES bersifat kolaboratif dan tidak terpusat pada pengelola saja. Dengan adanya ruang partisipasi yang beragam, masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam mendukung keberlanjutan program lingkungan.

Bentuk keadilan dan pengakuan sosial dalam KES juga terlihat melalui pemberian apresiasi kepada masyarakat yang aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah dan lingkungan. Pengelola memberikan penghargaan berupa bingkisan atau parsel kepada warga yang dinilai aktif berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Pemberian apresiasi tersebut menjadi bentuk pengakuan terhadap kontribusi masyarakat sekaligus upaya meningkatkan motivasi partisipasi warga secara berkelanjutan. Dalam teori Bennett & Satterfield (2018), pengakuan terhadap kontribusi masyarakat menjadi elemen penting dalam memperkuat rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap program lingkungan sehingga partisipasi masyarakat dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tujuan Equitable dalam KES masih menghadapi beberapa keterbatasan khususnya pada aspek transparansi informasi program. Informasi terkait pengelolaan keuangan KES masih bersifat internal dan hanya disampaikan kepada pengurus tertentu sehingga belum seluruh masyarakat memperoleh akses informasi secara terbuka. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip transparansi dalam tata kelola lingkungan

belum sepenuhnya optimal. Padahal dalam konsep *equitable governance*, keterbukaan informasi menjadi bagian penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memperkuat legitimasi program lingkungan berbasis partisipasi masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa KES telah menerapkan prinsip *Equitable* melalui pendekatan partisipatif, pengakuan terhadap keberagaman sosial masyarakat, pembagian peran yang inklusif, serta pemberian ruang evaluasi bagi masyarakat. KES juga menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola lingkungan tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis pengelolaan sampah tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan pengelola dalam membangun hubungan sosial, komunikasi partisipatif, dan rasa memiliki masyarakat terhadap program lingkungan. Namun demikian, aspek transparansi informasi dan pemerataan akses terhadap pengelolaan KES masih perlu ditingkatkan agar prinsip keadilan dalam tata kelola lingkungan dapat terlaksana secara lebih optimal dan berkelanjutan.

### ***Responsive (Responsif)***

Menurut Bennett & Satterfield (2018) menjelaskan bahwa "*the objective of being responsive ensures that environmental governance is adaptable both to changing environmental and social conditions and to diverse contexts. Responsive environmental governance arrangements exemplify: learning, anticipation, adaptability, innovation, and flexibility*" yang berarti tujuan bersifat responsif memastikan bahwa tata kelola lingkungan mampu beradaptasi terhadap perubahan kondisi lingkungan maupun sosial sekaligus terhadap beragam konteks yang ada. Berdasarkan hasil penelitian di KES, tujuan responsive ini dapat diamati melalui lima atribut yang saling berkaitan: *learning, anticipatory, adaptive, innovative, dan flexible*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KES telah menjalankan mekanisme pembelajaran organisasi secara nyata sebagaimana hasil wawancara dengan pengelola KES berikut, "*Untuk pemantauan itu selalu dilakukan ya. Pemantauan itu dilakukan ya, tidak harus satu orang yang memantau. Kami kan ada banyak, jadi mereka itu kalau mengetahui oh ini ada kerusakan atau apa, itu kan dicatat nanti pada saat evaluasi atau mungkin kalau urgen bisa langsung disampaikan di grup WA-nya KES*" (Wawancara dengan Pengelola KES, 2026). Pemantauan dilakukan secara bersama oleh para pengurus dan temuan disampaikan melalui grup komunikasi internal maupun forum evaluasi bulanan. Selain itu, KES membentuk kader muda lingkungan yang melibatkan generasi muda dari tingkat SMP hingga mahasiswa sebagai wujud regenerasi pengetahuan dan pewarisan pengalaman organisasi kepada generasi berikutnya. Dokumentasi kegiatan baik yang berhasil maupun yang gagal juga dijalankan sebagai bagian dari rekam jejak organisasi. Dari sisi pemerintah daerah, DLHK Kabupaten Sidoarjo melakukan monitoring timbulan sampah secara rutin dan menyimpan data program bank sampah KES sebagai bentuk kelembagaan memori organisasi.

Temuan ini selaras dengan penelitian Agusti & Wibawani (2023) yang menemukan bahwa partisipasi masyarakat KES dalam kegiatan pengelolaan lingkungan didorong oleh kesempatan yang diberikan secara terbuka kepada warga. Senada dengan itu, Safitri & Choiriyah (2023) mencatat bahwa program Bank Sampah KES berhasil dalam aspek pengembangan individu dan pelestarian

---

lingkungan yang salah satunya ditopang oleh kegiatan sosialisasi dan pelatihan kepada warga. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa atribut learning pada KES telah terwujud secara baik melalui monitoring rutin, evaluasi berkala, regenerasi kader lingkungan serta dokumentasi pengalaman organisasi.

Pada atribut antisipasi, penelitian menemukan bahwa pengelola KES memiliki orientasi jangka panjang yang jelas dengan menjaga program lingkungan tetap berjalan secara berkelanjutan dan tidak selesai di tengah jalan. Antisipasi terhadap kendala pendanaan dilakukan dengan menyediakan mekanisme pengajuan proposal sementara kendala partisipasi masyarakat diatasi melalui pendekatan edukasi yang terus-menerus dan pemberian fasilitas. Lebih dari itu, pengelola secara sadar menyiapkan regenerasi kepemimpinan dengan memastikan pengganti adalah orang-orang yang betul-betul peduli pada program sebagaimana hasil wawancara dengan pengelola KES sebagai berikut, *Misalkan ada pergantian, diusahakan yang menggantikan itu tetap orang-orang yang peduli. Biar programnya tetap bisa jalan*" (Wawancara dengan Pengelola KES, 2026). Di sisi pemerintah daerah, DLHK Kabupaten Sidoarjo memiliki orientasi jangka panjang untuk mengoptimalkan seluruh TPS3R agar pengelolaan sampah bergerak dari pendekatan pembuangan menuju pendekatan pengurangan di mana hanya residu sampah yang dikirim ke TPA.

Pada atribut adaptif, penelitian menunjukkan bahwa KES telah mempraktikkan adaptasi nyata dalam pengelolaan lingkungannya. Modifikasi sistem biopori menjadi sumur resapan berukuran lebih besar merupakan contoh konkret bagaimana pengelola bersedia mengubah metode yang dinilai kurang efektif berdasarkan kondisi lapangan. Keputusan adaptif ini tidak diambil secara sepihak melainkan melalui forum evaluasi pengurus yang berfungsi sebagai ruang deliberasi bersama. Di sisi pemerintah, DLHK Kabupaten Sidoarjo memberikan keleluasaan kepada masing-masing lingkungan untuk menyusun program pengelolaan sampah sesuai kebutuhan wilayahnya, dan mempertahankan kanal komunikasi dengan komunitas pengelola sampah melalui kader Zero Waste Academy. Senada dengan itu, Agusti & Wibawani (2023) menegaskan bahwa kemampuan masyarakat berpartisipasi berkorelasi kuat dengan kemampuan mereka merespons perubahan yang menyiratkan bahwa adaptasi bukan hanya fungsi pengurus tetapi juga kapasitas kolektif masyarakat yang terbentuk melalui keterlibatan aktif dalam program.

Pada atribut inovatif, penelitian menunjukkan bahwa budaya inovasi di KES telah tertanam dengan baik. Pengelola secara aktif mendukung pengurus dan kader untuk mencari metode baru yang lebih efektif dan lebih menarik bagi warga sekaligus menjadikan kegagalan program sebagai bahan pembelajaran. Inovasi tidak hanya tumbuh dari dalam tetapi juga diperoleh melalui studi banding ke daerah lain termasuk untuk mempelajari penerapan maggot dalam pengolahan sampah organik. Capaian paling menonjol dari semangat inovasi ini adalah lahirnya Lubang Sumber Organik (LSO) yang kemudian mendapat apresiasi dan dukungan dari DLHK Kabupaten Sidoarjo sebagai percontohan bagi kantor-kantor OPD di kabupaten sebagaimana hasil wawancara dengan DLHK Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut, *"LSO, lubang sumber organik, itu kita mengapresiasi, kita mensupport*

---

*mereka, kita jadikan percontohan”* (Wawancara dengan DLHK, 2026). Kabupaten Sidoarjo sebagai percontohan bagi kantor-kantor OPD di kabupaten. DLHK Kabupaten Sidoarjo juga memberikan kebebasan penuh kepada masyarakat untuk berinovasi dalam pengelolaan sampah organik maupun daur ulang sesuai kreativitas masing-masing.

Pada atribut fleksibel, penelitian menunjukkan gambaran yang menarik terkait fleksibilitas yakni munculnya dua pola yang berbeda antara level komunitas dan level pemerintah namun justru saling melengkapi. Di level komunitas, pengelola KES memahami bahwa setiap wilayah memiliki karakteristik lingkungan yang berbeda sehingga hasil pengelolaan sampah tidak selalu identik meskipun menggunakan metode yang sama sebagaimana hasil wawancara dengan pengelola KES berikut, *“Untuk pengelolaan lingkungan itu memang berbeda-beda ya... Meskipun kita mengambil contoh dan melakukan dengan cara yang sama persis, hasilnya kadang berbeda”* (Wawancara dengan Pengelola KES, 2026). Di level pemerintah, DLHK Kabupaten Sidoarjo menerapkan pendekatan yang relatif seragam kepada seluruh wilayah tanpa perlakuan khusus terhadap KES sebagaimana hasil wawancara dengan DLHK Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut, *“Itu memang kita samakan. Maksudnya itu nggak ada prioritas atau apa”* (Wawancara dengan DLHK, 2026). Meski demikian, DLHK Kabupaten Sidoarjo tetap memberikan ruang bagi setiap komunitas untuk menentukan keberlanjutan program sesuai kondisi wilayah masing-masing dan menilai bahwa pendekatan edukasi lingkungan yang diterapkan mampu diterima dengan baik oleh masyarakat di berbagai wilayah.

Secara keseluruhan, tujuan responsive dalam *Environmental Governance* Bennett & Satterfield (2018), KES telah terwujud melalui lima atribut yang saling menopang. Hal tersebut terlihat melalui adanya proses pembelajaran organisasi, kemampuan antisipatif terhadap tantangan lingkungan, penyesuaian program secara adaptif, pengembangan inovasi pengelolaan sampah, serta fleksibilitas dalam penerapan program sesuai kondisi masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat KES dapat dikatakan telah menerapkan prinsip-prinsip responsive governance dalam kerangka *Environmental Governance*.

### ***Robust (Ketahanan)***

Dalam teori *Environmental Governance* Bennett & Satterfield (2018), tujuan Robust menekankan pentingnya ketahanan tata kelola lingkungan melalui kelembagaan yang kuat, koordinasi antaraktor, kapasitas adaptif, serta keberlanjutan program dalam menghadapi tantangan lingkungan maupun sosial. Tata kelola yang *robust* menunjukkan kemampuan suatu sistem untuk tetap berjalan, beradaptasi, dan mempertahankan keberlangsungan program meskipun menghadapi berbagai keterbatasan. Dalam penelitian ini, aspek Robust dianalisis melalui subtujuan *legitimate, connected, nested, dan polycentric* dalam KES.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KES memiliki kelembagaan yang cukup kuat dan terorganisasi. Pengelola menjelaskan bahwa KES di bawah yayasan dan telah memiliki struktur organisasi yang terdiri atas pembimbing, pengawas, ketua, dan pengurus lainnya. Keberadaan struktur organisasi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan tidak hanya berjalan sebagai gerakan sosial informal

---

tetapi telah memiliki sistem kelembagaan yang mendukung keberlangsungan program. Dalam perspektif Bennett & Satterfield (2018), legitimasi kelembagaan menjadi faktor penting dalam menciptakan tata kelola lingkungan yang mampu bertahan dalam jangka panjang karena adanya pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas di dalam organisasi.

Selain memiliki struktur organisasi, sistem pengelolaan dalam KES dilakukan secara kolektif dan tidak bersifat hierarkis. Pengelola menekankan bahwa seluruh anggota komunitas dapat terlibat secara bersama-sama tanpa adanya dominasi kekuasaan tertentu. Pola kerja tersebut menunjukkan adanya hubungan kerja yang kolaboratif antaraktor dalam pengelolaan lingkungan. Kondisi ini sejalan dengan teori Bennett & Satterfield (2018) yang menjelaskan bahwa tata kelola lingkungan yang *robust* membutuhkan hubungan sosial yang kuat dan kolaboratif agar program tidak bergantung pada individu tertentu, melainkan dibangun melalui kerja sama komunitas secara berkelanjutan.

Ketahanan tata kelola lingkungan dalam KES juga terlihat dari adanya jejaring kolaborasi dengan berbagai pihak eksternal, seperti DLHK Kabupaten Sidoarjo, universitas, serta sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Kerja sama tersebut dilakukan dalam bentuk dukungan pendanaan, bantuan fasilitas, maupun kegiatan edukasi lingkungan. Kolaborasi dengan universitas juga mendukung pengembangan pengetahuan dan edukasi masyarakat terkait pengelolaan sampah berbasis lingkungan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan program tidak hanya bergantung pada kekuatan internal masyarakat tetapi juga diperkuat melalui konektivitas antaraktor lintas sektor. Dalam teori Bennett & Satterfield (2018), konektivitas dan integrasi antaraktor menjadi elemen penting dalam menciptakan tata kelola lingkungan yang tangguh dan berkelanjutan.

Dukungan pemerintah daerah melalui DLHK Kabupaten Sidoarjo turut memperkuat tujuan Robust dalam KES. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DLHK Kabupaten Sidoarjo tetap melakukan *monitoring* dan pendampingan kepada masyarakat agar program pengelolaan lingkungan tetap berjalan. Pendampingan tersebut dilakukan untuk menjaga keberlanjutan program dan mencegah penurunan partisipasi masyarakat. Selain itu, keberadaan Program Sidoarjo Bersih dan Hijau (SBH) juga menjadi salah satu bentuk dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan berbasis komunitas sebagaimana dari hasil wawancara dengan pengelola KES berikut, "*Awalnya dulu ada pendampingan waktu kita SBH, kemudian selanjutnya kita belajar secara otodidak tentang pengelolaan sampah dan lingkungan*" (Wawancara dengan Pengelola KES, 2026). Kondisi ini menunjukkan adanya legitimasi dan dukungan kelembagaan dari pemerintah terhadap keberlanjutan KES.

Kemampuan adaptif masyarakat juga menjadi salah satu indikator kuat dalam penerapan tujuan Robust. Pengelola dan kader lingkungan secara aktif meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pendampingan, dan pembelajaran mandiri terkait pengelolaan sampah dan isu lingkungan terkini. Pengelola menjelaskan bahwa kader lingkungan harus terus dibekali pengetahuan yang sesuai dengan perkembangan isu lingkungan termasuk perubahan iklim dan

---

pengelolaan sampah. Selain memperoleh pelatihan dari DLHK Kabupaten Sidoarjo masyarakat juga mengembangkan kemampuan secara otodidak berdasarkan pengalaman pengelolaan lingkungan yang telah dijalankan. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kapasitas belajar dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kondisi lingkungan.

Dari sisi sarana dan prasarana, hasil penelitian menunjukkan bahwa KES telah memiliki fasilitas pendukung yang cukup memadai, seperti komposter aerob, pencacah daun, bank sampah, dan lainnya seperti yang dijelaskan pada hasil wawancara dengan pengelola KES berikut, "*Mulai dari pencacah daun, pencacah ranting, media pengomposan... itu sudah ada semua*" (Wawancara dengan Pengelola KES, 2026). Fasilitas tersebut mendukung proses pengelolaan sampah organik maupun anorganik. Sampah organik dimanfaatkan menjadi kompos untuk kebutuhan lingkungan sekitar, sedangkan sampah anorganik dikelola melalui bank sampah sehingga memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Pemanfaatan kembali hasil pengolahan sampah menunjukkan adanya efisiensi dalam pengelolaan sumber daya lingkungan berbasis masyarakat.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan Robust dalam KES masih menghadapi beberapa tantangan, khususnya pada aspek pendanaan. Pengelola menyampaikan bahwa biaya perawatan lingkungan dan *maintenance* fasilitas membutuhkan pendanaan yang cukup besar dan harus dilakukan secara kontinu. Sementara itu, dukungan anggaran pemerintah masih terbatas sehingga program lebih banyak bergantung pada pendanaan mandiri hasil kunjungan edukasi dan bantuan CSR. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan program masih memiliki kerentanan apabila dukungan finansial mengalami penurunan. Selain itu, penelitian Safitri & Choiriyah (2023) juga mengidentifikasi adanya faktor penghambat dalam pengelolaan KES yang berkaitan dengan keberlanjutan pelaksanaan program. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian ini bahwa keberlanjutan tata kelola lingkungan berbasis masyarakat masih memerlukan dukungan sumber daya dan pendampingan yang konsisten agar program dapat berjalan secara optimal dalam jangka panjang. Dalam konteks tata kelola lingkungan, keterbatasan sumber daya finansial dapat memengaruhi efektivitas dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Selain kendala pendanaan, aspek administrasi dan dokumentasi program juga masih perlu diperkuat. Dokumentasi kegiatan sebagian besar dilakukan melalui media sosial dan dokumentasi digital secara sederhana sehingga sistem administrasi kelembagaan belum sepenuhnya terstruktur secara formal.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa KES telah mencerminkan tujuan Robust dalam teori Environmental Governance Bennett & Satterfield (2018) melalui kelembagaan yang terorganisasi, hubungan kolaboratif antaraktor, kapasitas adaptif masyarakat, serta keberlanjutan pengelolaan lingkungan berbasis komunitas. Dukungan pemerintah daerah melalui Program Sidoarjo Bersih dan Hijau (SBH), jejaring kolaborasi lintas sektor, dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting yang memperkuat ketahanan tata kelola lingkungan di KES. Namun demikian, aspek pendanaan dan penguatan administrasi kelembagaan masih perlu ditingkatkan agar keberlanjutan program

dapat berjalan secara lebih optimal, akuntabel, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

## SIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *Environmental Governance* di Kampung Edukasi Sampah (KES) di Kelurahan Sekardangan Kabupaten Sidoarjo telah berjalan cukup baik melalui keterlibatan aktif masyarakat, dukungan kelembagaan lokal, serta sinergi dengan pemerintah daerah melalui Program Sidoarjo Bersih dan Hijau (SBH) yang kemudian bertransformasi secara mandiri menjadi Yayasan Edukasi Kelolah Sampah pada tahun 2023. Berdasarkan tujuan *Effective*, program mampu berjalan secara terarah melalui koordinasi antara masyarakat, pengurus Kampung Edukasi Sampah (KES), dan pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Pada tujuan *Equitable*, masyarakat memperoleh kesempatan yang setara dalam berpartisipasi pada kegiatan pengelolaan sampah, edukasi lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, tujuan *Responsive* menunjukkan bahwa Kampung Edukasi Sampah (KES) mampu menyesuaikan diri terhadap kebutuhan masyarakat melalui inovasi pengelolaan sampah, kegiatan edukasi lingkungan, dan pengembangan program berbasis masyarakat. Selanjutnya, pada tujuan *Robust*, Kampung Edukasi Sampah (KES) menunjukkan keberlanjutan melalui penguatan kelembagaan, terbentuknya jaringan kerja sama, serta konsistensi masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup. Keberhasilan tersebut dibuktikan melalui berbagai penghargaan yang diraih serta penetapan Kampung Edukasi Sampah (KES) sebagai *role model* pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. Namun demikian, penelitian ini masih menemukan beberapa kendala seperti belum optimalnya kapasitas masyarakat dalam pengelolaan dan klasifikasi sampah, perlunya penguatan pendampingan, dan dukungan kelembagaan dari pemerintah daerah sebagai penggerak program. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar DLHK Kabupaten Sidoarjo lebih intensif dalam melakukan pendampingan, pelatihan, serta monitoring terhadap keberlanjutan Kampung Edukasi Sampah (KES). Selain itu, diperlukan penguatan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya agar implementasi *Environmental Governance* dalam pengelolaan sampah dapat berjalan lebih optimal, adaptif, dan berkelanjutan, salah satunya dengan mewujudkan Kampung Edukasi Sampah (KES) di daerah-daerah lainnya.

## DAFTAR RUJUKAN

- Agusti, V. N., & Wibawani, S. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup di Kampung Edukasi Sampah. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 111-123. <https://doi.org/https://doi.org/10.52423/neores.v5i1.119>
- Bennett, N. J., & Satterfield, T. (2018). Environmental Governance: A Practical Framework to Guide Design, Evaluation, and Analysis. *Conservation Letters*, 11(6), 1-13. <https://doi.org/10.1111/conl.12600>
- Creswell J. W., & D., C. J. (2023). Research Design: Qualitative, quantitative and

- mixed methods approaches. In *SAGE Publications, Inc.*
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83. <https://doi.org/10.29210/3003906000>
- Kampung Edukasi Sampah. Retrieved from <https://kampunedukasisampah.id/>
- Kementerian Lingkungan Hidup. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. Fasya, A. H. Z. F., Ibad, M., El Muna, K. U. N., & Arum, S. A. S. A. (2025). *A Systematic Review Of Solid Waste Management In Indonesia: Generation, Characteristics, Treatment, And Regulation*. 17(4), 333-342. <https://doi.org/10.20473/jkl.v17i4.2025.333-342>
- Retrieved from <https://sampahnasional.kemenvh.go.id/portal-indikatif/>
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0021100.AH.01.04 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pendirian Yayasan Edukasi Kelola Sampah.
- Konsentrasi Isu Strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025-2029.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2018). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (4th ed.). Britania Raya: SAGE Publications.
- Mustaghfiroh, U., Ni'mah, L. K., Sundusiyah, A., Addahlawi, H. A., & Hidayatullah, A. F. (2020). Implementasi Prinsip Good Environmental Governance dalam Pengelolaan Sampah di Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, 4(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v4i2.106>
- Ningsih, H. S., & Farid, M. M. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kampung Edukasi Sampah DI Kelurahan Sekardangan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Publika*, 11(2), 1835-1848. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/publika.v11n2.p1835-1848>
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- Ramadhon, A. I. (2026). Hambatan Penyerahan PSU Perumahan : Menilik Melalui Model Implementasi Kebijakan Ade Kearns & Louise Lowson di Kabupaten Sidoarjo. *Journal of Administrative and Social Science*, 7(1), 281-295. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jass.v7i1.2233>
- Safitri, A. D., & Choiriyah, I. U. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Bank Sampah ( Studi pada Kampung Edukasi Sampah di Kelurahan Sekardangan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo ). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(3), 2994-3002. <https://doi.org/10.33087/jjubj.v23i3.4559>
- Stratton, S. J. (2024). Purposeful Sampling: Advantages and Pitfalls. *Prehospital and Disaster Medicine*, 39(2), 121-122. <https://doi.org/10.1017/S1049023X24000281>
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Wijayanti, D. R., & Suryani, S. (2015). Waste Bank as Community-based Environmental Governance : A Lesson Learned from Surabaya. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 184, 171-179. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.05.077>